



MENKEU AKAN TARIK RP 200 T DARI BI, UNTUK APA?

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, akan menarik Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) guna dialihkan ke system perekonomian. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Rabu (10/9/2025). Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya strategis untuk menghidupkan kembali dua mesin utama perekonomian, yakni fiskal dan moneter. Selama ini, dana pemerintah yang mengendap di bank sentral dianggap tidak produktif karena tidak mengalir ke sektor riil. Dengan dialihkan ke sistem perbankan, likuiditas akan meningkat dan perbankan terdorong untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat serta dunia usaha. Kebijakan ini sekaligus menjadi koreksi atas kesalahan masa lalu ketika pada 2023 hingga 2024 perekonomian melambat akibat pengetatan likuiditas, suku bunga tinggi, serta belanja APBN yang tidak tepat waktu. Purbaya menekankan, perekonomian Indonesia sejatinya didorong oleh konsumsi domestik yang mencapai 90 persen. Karena itu, dana segar ini diharapkan bisa memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong roda ekonomi nasional bergerak lebih cepat. Dia juga berharap kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras, tidak lagi saling mengerem. Tujuannya menjaga stabilitas, mempercepat pemulihan, dan menggerakkan kembali perekonomian Indonesia.

..... **BACA HAL 11...**



KEMENPERIN REFORMASI KEBIJAKAN TKDN

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan reformasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Langkah tersebut dilakukan setelah mendapat desakan dari 400 ekonom yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia yang menuntut pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan pelonggaran kebijakan TKDN di sektor yang belum memiliki pemasok lokal berkualitas dan pembinaan pada industri lokal yang dengan memperkuat pada sisi investasi SDM, transfer teknologi, dan pembangunan infrastruktur.

Lebih lanjut, aliansi ini juga menyampaikan bahwa kebijakan TKDN yang kaku berdampak terhadap kenaikan biaya produksi dan belum menghasilkan produk berkualitas sehingga menghilangkan daya saing produk Indonesia dipasar global. Kebijakan TKDN yang kaku juga memunculkan celah korupsi dalam proses perizinan dan pengadaan.

Aliansi ini juga menyampaikan dampak buruk penerapan kebijakan TKDN terhadap iklim investasi, harga produk ditingkat konsumen, daya saing industri, alokasi sumberdaya, potensi pelanggaran aturan WTO, perdagangan internasional Indonesia, dan akses Indonesia pada pasar global.

Aliansi ekonomi juga merujuk penelitian ERIA (2023) dan CSIS (2023) yang menggambarkan dampak penerapan TKDN yang memperburuk iklim investasi, menurunkan produktivitas industri, membebani konsumen dengan harga lebih mahal, menurunkan daya saing industri, memicu distrorsi.

Menanggapi desakan 400 ekonom yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia ini, Kemenperin menyampaikan bahwa telah melakukan apa yang telah menjadi tuntutan para ekonom tersebut melalui reformasi kebijakan TKDN. Reformasi TKDN terutama ditujukan pada tata cara perhitungan skor TKDN yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat dan tentu saja tidak kaku sebagaimana yang dituntut oleh aliansi ekonom.

"Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Kartasmita dan jajaran di Kemenperin sudah mengevaluasi dan mereformasi kebijakan TKDN. Evaluasi dan reformasi didasarkan pada suara publik, industri, investor, ekonom dan semua yang terlibat dalam ekosistem industri terutama industri yang memproduksi produk ber TKDN," ujar Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief, Rabu (10/9/2025).

Dia menambahkan, hasilnya, adanya Rpermenperin Tata Cara Perhitungan TKDN yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kepentingan industri lokal terutama industri kecil dan menengah dalam memperoleh sertifikat TKDN. Sehingga bisa meningkatkan daya



Juru Bicara Kemenperin,
Febri Hendri Antoni Arief.

saing perusahaan industri dan produknya, menyerap tenaga kerja lebih besar, mendatangkan investasi dari dalam dan luar negeri dan yang paling penting memperkuat ekosistem dan rantai pasok industri dalam negeri.

Lebih lanjut Febri menjelaskan, Kemenperin menempuh langkah reformasi TKDN. Karena, regulasi lama yang sudah berlaku lebih dari satu dekade perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan industri dalam negeri saat ini. Terlebih lagi merespon permintaan domestik yang berasal dari kebutuhan pemerintah atau kebutuhan rumah tangga atas produk manufaktur tertentu. Reformasi TKDN dilakukan dengan penekanan pada prinsip murah, mudah, cepat, dan berbasis insentif.

"Jika dahulu proses sertifikasi bisa memakan waktu lebih dari 20 hari kerja dengan biaya relatif tinggi, kini lewat skema baru, sertifikasi bisa selesai hanya dalam 10 hari kerja. Untuk industri kecil, bahkan cukup tiga hari melalui mekanisme self declare," ungkapnya.

Reformasi ini juga menghadirkan insentif tambahan, seperti nilai TKDN minimal 25% bagi perusahaan yang berinvestasi dan menyerap tenaga kerja lokal. Kemudian juga ada tambahan 20% bagi yang melakukan riset dan pengembangan.

"Dengan begitu, penghitungan TKDN bukan lagi sekadar kewajiban administratif, tapi menjadi reward system yang mendorong inovasi dan investasi," imbuhnya.

Melalui reformasi TKDN, lanjut Febri, Kemenperin justru memberi perhatian khusus bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Pelaku IKM kini mendapat kemudahan dalam pengajuan sertifikasi TKDN, termasuk dengan skema self declare yang berlaku selama lima tahun.

"Dengan metode self declare, IKM bisa lebih cepat memperoleh sertifikat TKDN dengan biaya yang sangat ringan, bahkan dapat mencapai nilai TKDN lebih dari 40% tanpa kerumitan administrasi seperti sebelumnya. Ini adalah bentuk afirmasi agar IKM bisa sejajar dengan industri menengah dan besar," tuturnya.

Selain itu, informasi nilai TKDN juga kini lebih transparan karena dapat diakses melalui label dan kemasan produk. Langkah ini mempermudah konsumen maupun lembaga pemerintah dalam memastikan produk IKM berdaya saing dan memenuhi syarat pengadaan barang dan jasa.

"Harapan kami, semakin banyak IKM yang memanfaatkan fasilitas ini, sehingga produk mereka tidak hanya kompetitif di pasar lokal, tetapi juga mampu menembus rantai pasok industri skala besar," tambah Febri.

Terkait dengan TKDN sektoral seperti TKDN untuk HKT yang dinilai kaku dan menghambat investasi. Maka Kemenperin hanya membuat kebijakan tata cara perhitungan dan pemenuhan TKDN pada produk sektor yang Threshold TKDN.

"Bahkan, investor asing terutama investor atau pebisnis yang belum bisa membangun fasilitas produksi di

“

Menteri Perindustrian,
Bapak Agus
Gumiwang Kartasmita
dan jajaran di
Kemenperin sudah
mengevaluasi dan
mereformasi kebijakan
TKDN. Evaluasi dan
reformasi didasarkan
pada suara publik,
industri, investor,
ekonom dan semua
yang terlibat dalam
ekosistem industri
terutama industri yang
memproduksi produk
ber TKDN,”

**Febri Hendri
Antoni Arief,**

Juru Bicara Kemenperin

Indonesia mengharapkan kebijakan TKDN sektoral tersebut tetap diberlakukan,” ujar Febri.

Menurut Febri, reformasi TKDN juga lahir dari hasil evaluasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi pelaku usaha, mulai dari tingginya biaya pengurusan sertifikat, masa berlaku yang terlalu singkat, hingga fenomena TKDN washing oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, proses sertifikasi dilakukan secara digital sehingga meminimalisir kontak antara pelaksana verifikasi dan pemohon sertifikasi TKDN.

"Lewat regulasi baru, sertifikat TKDN kini berlaku hingga lima tahun dengan mekanisme pengawasan lebih ketat. Kami juga membentuk Tim Pengawas di bawah Inspektorat Jenderal untuk memastikan tidak ada lagi praktik manipulasi sertifikasi, kecurangan yang menjadi celah korupsi, baik oleh pelaku usaha maupun lembaga verifikasi," jelasnya. (han,rls/lut)

FIT AND PROPER TEST CALON HAKIM AGUNG

KOMISI III DPR SOROTI PRAKTIK MAFIA PERADILAN DAN KORUPSI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengatakan akan mendorong dan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) soal perlindungan pekerja transportasi daring termasuk ojek online, yang didalamnya mengatur agar para pekerja tersebut bisa mendapatkan hak atas jaminan sosial.

Sebanyak 13 calon hakim agung dan tiga calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi III DPR RI selama empat hari tanggal 9,10,11, dan 16 September. Dalam fit and proper test ini, Komisi III menyoroti praktik mafia hukum dan penegakan hukum terkait korupsi.

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbially Ilyas, mengingatkan bahwa publik sudah lama mendengar isu mafia hukum, mafia peradilan, maupun mafia pajak. Legislator PKB asal Dapil Jakarta I ini mengatakan bahwa Praktik mafia menjamur di berbagai sektor. Bahkan, banyak pejabat yang menjadi mafia.

"Hampir di semua sektor mafia itu ada, termasuk di peradilan. Godaan ini nyata, dan tidak semua bisa bertahan menjaga integritas. Bagaimana Pak Budi memastikan tidak ikut terseret dalam praktik tersebut?" ujar Hasbia



"Saya berharap keputusan yang diambil nantinya tidak menyusahkan rakyat, tidak membebani masyarakat, tetapi tetap mampu menghadirkan pemasukan yang optimal bagi negara,"

Hasbially Ilyas
Anggota Komisi III DPR RI,



Pelaksanaan fit and proper test calon hakim agung di DPR. (detik)

dalam fit and proper test terhadap Budi Nugroho di Komisi III DPR RI, Rabu (10/9/2025).

Selain itu, Ketua DPW PKB Jakarta itu juga menyinggung kompleksitas persoalan perpajakan. Menurutnya, calon Hakim Agung harus mampu mengambil posisi yang adil dalam menangani semua perkara.

"Saya berharap keputusan yang diambil nantinya tidak menyusahkan rakyat, tidak membebani masyarakat, tetapi tetap mampu menghadirkan pemasukan yang optimal bagi negara," tambahnya.

Hasbi menegaskan bahwa Komisi III DPR RI memiliki harapan besar agar setiap calon Hakim Agung benar-benar memegang teguh integritas dan keadilan, bukan sekadar menyampaikan janji dalam uji kelayakan, tetapi membuktikannya ketika telah mengemban amanah.

Dia juga menyoroti latar belakang pendidikan calon hakim, salah satunya Budi Nugroho yang berasal dari disiplin akuntansi dan perpajakan, serta pengalaman lima tahun terakhir sebagai hakim di Pengadilan Pajak yang menangani sengketa perpajakan, kepabeanan, dan bea cukai.

"Artinya, lingkungan di Mahkamah Agung merupakan lingkungan baru bagi Pak Budi. Kita tahu Mahkamah Agung adalah benteng terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilan. Karena itu, saya perlu menanyakan komitmen Bapak dalam menjaga integritas," tegas Hasbi.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafarez Lebih menyoroti pesan penting dari putusan hakim agung dalam perkara besar, terutama kasus korupsi yang menjadi sorotan publik. "Bagaimana Anda memastikan bahwa putusan di Mahkamah Agung nanti didasarkan

pada analisis independen, bukan sekadar penguatan vonis yang sudah ada, khususnya terkait dengan perkara-perkara yang ramai di publik?" lanjut Gilang.

Gilang juga mengulas makalah yang disampaikan Agustinus, serta menyinggung rekam jejak putusannya yang dinilai kerap menguatkan pertimbangan pengadilan tingkat pertama. "Apakah ini mencerminkan filosofi yudisial Anda? Dan bagaimana Anda memastikan bahwa nanti tidak hanya menjadi stempel bagi putusan di bawah, melainkan benar-benar melakukan analisis hukum yang independen?" tegas legislator muda tersebut.

Dia juga menyoroti pandangan Agustinus mengenai relevansi hukum acara pidana di era reformasi hukum. "Menurut Saudara, apakah konsep koneksitas dalam hukum acara pidana masih relevan dengan kebutuhan sistem peradilan modern, khususnya di era reformasi hukum dan demokratisasi?" tanya Gilang.

Agenda fit and proper test ini menjadi tahapan penting untuk menilai integritas, visi, serta komitmen calon hakim agung. Hasil dari uji kelayakan di Komisi III DPR RI akan menentukan langkah Agustinus Purnomo Hadi menuju kursi hakim agung di Mahkamah Agung.

Dalam fit and proper test ini masing-masing calon hakim agung dan hakim ad hoc punya waktu paling lama 90 menit, termasuk 15 menit digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah atau pengenalan.

"Alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan masing-masing calon hakim agung dan hakim ad hoc paling lama 90 menit, termasuk 15 menit digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah atau

Berikut 13 nama calon hakim agung dan tiga nama calon hakim ad hoc HAM yang menjalani fit and proper test oleh Komisi III:

Calon hakim agung

1. Alimin Ribut Sujono, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin
2. Annas Mustaqim, Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA
3. Julius Panjaitan, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu
4. Suradi, Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA
5. Ennid Hasanuddin, Hakim Tinggi MA
6. Heru Pramono, Hakim Tinggi MA
7. Lailatul Arofah, Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA
8. Muhayah, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
9. Agustinus Purnomo Hadi, Hakim Ad Hoc Tipikor MA
10. Hari Sugiharto, Hakim Tinggi Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN
11. Budi Nugroho, Hakim Pengadilan Pajak
12. Diana Malemita Ginting, Auditor Utama Itjen Kemenkeu
13. Triyono Martanto, Hakim Pengadilan Pajak.

Calon hakim ad hoc HAM

1. Puguh Haryogi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
2. Agus Budianto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
3. Bonifasius Nadya Arybowo, Hakim Ad Hoc Tipikor pada PN Bandung.

perkenalan," ujar Wakil Ketua Komisi III Rusdi Masse Mappasessu membuka fit and proper test calon hakim agung, Selasa (9/9/2025).

Setiap anggota Komisi III diberikan waktu tiga menit untuk menanggapi presentasi dari para calon hakim agung. Lebih lanjut, Rusdi menyebut bahwa calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM itu nantinya menandatangani surat pernyataan yang telah disediakan DPR. "Setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan ini," ujar politikus Partai Nasdem itu.

Sebelum fit and proper test, Komisi Yudisial (KY) menyatakan sebanyak 13 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc HAM tersebut dinyatakan lolos dan dilaporkan kepada Komisi III. Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai mengatakan, seleksi dilakukan secara transparan, melibatkan berbagai lembaga negara, dan memberikan ruang partisipasi masyarakat. (rls,ist/lut)

BRIPKA ROHMAT DAN KOMPOL KOSMAS PELINDAS OJOL AFFAN **RESMI BANDING**

Basat Brimob Polda Metro Jaya, Briпка Rohmat, sopir rantis yang melindas driver ojol Affan Kurniawan hingga tewas mengajukan banding atas sanksi demosi 7 tahun yang diterimanya. Hal serupa dilakukan Komandan Batalyon (Danyon) Resimen IV Korps Brimob (Korbrimob) Polri, Kompol Kosmas K Gae yang dipecat tidak hormat.

Kompol Kosmas dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH). Kosmas sendiri duduk di samping sopir saat rantis melindas Affan.

"Terhadap keputusan sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri) yang telah digelar minggu lalu, keduanya telah mengajukan banding," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Rabu (10/9/2025).

Sebagai informasi, sidang etik terhadap Kosmas telah digelar pada Rabu, (3/9/2025) lalu. Sedangkan Rohmat pada Kamis (4/9/2025).

Ada 7 orang anggota brimob yang berada dalam rantis yang melindas Affan hingga tewas pada Kamis (28/8/2025) lalu. Rohmat merupakan sopirnya dan perwira yang ada di sebelahnya adalah Kompol Kosmas K Gae.

Sementara, sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap lima personel Brimob yang diduga terlibat dalam insiden tragis yang menyebabkan kematian driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan masih tertunda.

Penyebabnya, kelengkapan berkas perkara untuk sidang etik belum rampung, sehingga proses hukum terhadap para personel ini belum dapat digelar.

Trunoyudo menyebut sidang etik terhadap terduga pelanggar kategori sedang akan segera digelar. Namun dia belum menginformasikan perihal waktu pastinya.

"Kelima personel (penumpang) lainnya dalam proses pelengkapan berkas perkaranya untuk di selenggarakan pada sidang KKEP berikutnya," pungkas Trunoyudo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki kematian pengendara ojek online Affan Kurniawan yang meninggal dunia karena dilindas rantis Brimob.

Prabowo menyatakan akan mempelajari tuntutan masyarakat yang dinilainya masuk akal, normatif dan dapat didiskusikan dengan baik. Wacana ini disampaikan pada pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa di Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu (6/9/2025) itu.

"Saya kira kalau tim investigasi



Pengemudi ojol bersama Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya menggelar doa bersama untuk mengenang Affan Kurniawan. (Ist)

independen, saya kira ini masuk akal. Saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya seperti bagaimana," kata Prabowo melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Dalam pertemuan selama 14 jam bersama pimpinan redaksi media massa, Prabowo menegaskan tuntutan masyarakat dapat diterima dan dibicarakan lebih lanjut.

Namun demikian, Prabowo menyebut ada poin yang dapat diperdebatkan, yaitu usulan penarikan TNI dari pengamanan sipil.

Menurut Presiden, tugas TNI adalah menjaga masyarakat, terutama dari ancaman mana pun. Ancaman tersebut dapat berupa aksi pembakaran dan kerusuhan kepada masyarakat.

"Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya saudaralah yang menilai apa

ini masuk akal atau tidak, iya kan? Terorisme itu ancaman, membakar-bakar itu ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable," kata Presiden.(wid,rls,ist/dya)

PELAKU PELINDASAN OJOL AFFAN

PELANGGARAN ETIK BERAT:



Bripka Rohmat (sopir rantis):
sanksi demosi 7 tahun (banding)



Kompol Kosmas K Gae (duduk di sebelah kemudi rantis):
sanksi PTDH (banding)

PELANGGARAN ETIK SEDANG: duduk di kursi penumpang belakang

1. Aipda M Rohyani
2. Briptu Danang
3. Briptu Mardin
4. Baraka Jana Edi
5. Baraka Yohanes David

Menko Yusril dan Kompolnas Satu Suara: Harus Diproses Pidana

KOMISI Kepolisian Nasional atau Kompolnas menegaskan bahwa kasus tewasnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan tidak bisa diselesaikan hanya melalui sidang etik. Hal senada diungkapkan Menteri Koordinator (Menji) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasaran (Menko Kumas Imipras), Yusril Ihza Mahendra.

Komisioner Kompolnas, Choirul Anam meminta Polri untuk tetap mengusut dugaan unsur pidana terhadap Kompol Cosmas dan Briпка Rohmat.

"Sejak awal Kompolnas itu mendorong agar kedua terduga ini (Cosmas dan Rohmat) masuk mekanisme pidana, tidak cukup berhenti di etik," kata Anam, dikutip Rabu (10/9/2025).

Anam menekankan bahwa kematian Affan memiliki kaitan langsung dengan kendaraan taktis atau rantis Brimob yang dikemudikan Rohmat. Berdasarkan rekaman CCTV yang dikumpulkan, terlihat ada jeda waktu antara saat Affan terjatuh dengan ketika ia terlindas.

"Itu ada jarak, jatuh duluan, baru kelindas dan terus maju. Jadi bukan tidak ada pertanggungjawaban mobil rantis... ada [kaitannya]," tegas Anam.

"Makanya sejak awal Kompolnas mendorong pertanggungjawaban pidana. Jadi tidak cukup dengan mekanisme etik, tapi juga dengan mekanisme pidana," sambungnya.

Sebelumnya, Menko Yusril juga memastikan, dua personel Brimob yang terlibat penabrakan pengemudi ojol, Affan Kurniawan akan diproses secara pidana.

Yusril menegaskan, pemerintah akan bertindak tegas terhadap aparat penegak hukum yang bertindak tak profesional, serta memastikan akuntabilitas penuh.

"Tujuh anggota Brimob telah menjalani sidang etik. Dua orang dinyatakan tidak profesional dalam menjalankan tugas," kata Menteri Yusril Ihza Mahendra se usai menghadiri rapat tingkat menteri (RTM) di Jakarta, Senin (8/9/2025).

Yusril menyampaikan dua oknum Brimob tersebut tidak hanya menerima sanksi etik, melainkan juga akan diproses di pengadilan

umum dan didakwa atas tindak pidana.

Dulu saya bilang tidak tertutup kemungkinan. Hari ini jelas mereka akan dilanjutkan ke persidangan di peradilan umum," tegasnya.

Ia menambahkan pemerintah tak hanya memproses aparat yang bersalah, tetapi juga bertanggung jawab atas korban yang terdampak oleh aksi unjuk rasa.

Untuk korban di daerah, pemerintah daerah menanggung biaya perawatan agar keluarga tak terbebani.

Lebih jauh, bagi korban yang meninggal, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama pemerintah sedang menyiapkan santunan serta perlindungan. Pelaksanaannya akan dilakukan bersama pemerintah daerah atau Kementerian Sosial.

"Bantuan meliputi beasiswa pendidikan dan dukungan bagi keluarga yang ditinggalkan," kata Yusril.(wid,rls,ant/dya)

BALI DARURAT BANJIR: 3 TEWAS, EVAKUASI SULIT

Banjir bandang menerjang Denpasar, Bali. Tujuh orang dilaporkan menjadi korban. Empat orang masih dalam pencarian dan tiga ditemukan meninggal dunia. Tim evakuasi kesulitan menjangkau lokasi, karena hampir seluruh wilayah terdampak. BPBD Bali menyebut banjir kali ini merupakan yang terparah dalam sepuluh tahun terakhir.

Hujan ekstrem lebih dari 24 jam membuat sejumlah wilayah di Bali lumpuh akibat banjir besar. Empat daerah terdampak paling parah adalah Denpasar, Jembrana, Gianyar, dan Tabanan.

Data sementara BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) mencatat, dua orang meninggal dunia dan empat warga masih hilang dalam musibah ini. Namun menurut update pemerintah setempat, jumlah meninggal bertambah satu sehingga total menjadi 3 orang.

Kepala BNPB, Suharyanto, menegaskan pihaknya segera mengirim bantuan logistik dasar seperti makanan, pakaian, tenda, hingga perlengkapan darurat lain untuk korban terdampak. "Asesmen kebutuhan mendesak juga terus dilakukan di lapangan. Hari ini kami masuk ke Bali untuk memimpin operasi tanggap darurat bersama pemerintah daerah," kata dia, Rabu (10/9/2025).

Sementara itu, Basarnas Bali mengaku kesulitan menjangkau lokasi banjir karena hampir seluruh wilayah terdampak. Kepala Kantor SAR Bali, I Nyoman Sidakarya, menyebut air menggenangi sejumlah titik di Denpasar seperti Pulau Misol, Pulau Biak 1, Pura Demak, hingga kawasan Teuku Umar. Tim gabungan berhasil mengevakuasi dua balita, dua lansia, dan tiga orang dewasa dari rumah-rumah yang terendam banjir.

I Nyoman mengingatkan masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri jika memungkinkan, mengingat hujan deras diprediksi masih berlanjut dan berpotensi menimbulkan banjir susulan.

BNPB memastikan distribusi logistik akan dilakukan secepat mungkin bersama pemerintah daerah agar kebutuhan dasar warga terpenuhi dan pemulihan pascabanjir segera dimulai.

Sementara, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat tujuh korban akibat banjir bandang yang melanda Denpasar. Tiga korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara empat lainnya yang diketahui merupakan pedagang di Pasar Kumbasari masih dalam proses pencarian.

"Sekarang yang pertama adalah

membersihkan dulu sampah yang muncul di wilayah pasar, jalan, dan titik lainnya," katanya.

Wali Kota telah memerintahkan seluruh jajarannya hingga ke desa/kelurahan untuk melakukan evakuasi dan pertolongan bagi korban. Seluruh warga Denpasar diminta tetap waspada dengan kondisi cuaca ekstrem yang terjadi.

Presiden Prabowo Berduka

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara



PAKAR iklim BMKG, Siswanto, menjelaskan curah hujan harian di Bali mencapai angka luar biasa. "Di Jembrana, curah hujan ekstrem tercatat 385,5 mm per hari. Ini bahkan merupakan hujan dengan curah tertinggi dalam catatan sejarah," ujarnya, Rabu (10/9/2025).

Intensitas serupa juga terpantau di Stasiun Geofisika Denpasar dengan angka 188,4 mm. Analisis BMKG menyebut hujan lebat ini dipicu fenomena atmosfer Gelombang Ekuatorial Rossby yang memicu pertumbuhan awan konvektif dan hujan ekstrem.

"Gelombang Rossby bergerak dari barat ke timur di sepanjang ekuator. Saat aktif, gelombang ini



Petugas mengevakuasi wisatawan mancanegara yang terjebak banjir di kawasan Kuta, Badung, Bali, Rabu (10/9/2025).antara

Timur," kata Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Rabu (10/9/2025).

Menurut Teddy, Prabowo menginstruksikan Kepala BNPB Letjen Suharyanto serta instansi terkait lain untuk bertindak cepat mengatasi bencana di lokasi.

Selain itu, ia mengatakan Prabowo juga menekankan akan pentingnya distribusi bantuan secara cepat dan tepat sasaran.

Teddy menyampaikan setelah mendapatkan instruksi Prabowo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto langsung bergegas ke Bali untuk memimpin penanganan tanggap darurat.

"Dan memastikan upaya pencarian dan pertolongan, serta pemenuhan kebutuhan logistik dasar warga

terdampak bisa dilaksanakan secara optimal," ujarnya.

Banjir menerjang wilayah Bali. Gubernur Bali I Wayan Koster menyatakan banjir merendam 43 titik di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Bali.

Koster menyebut banjir terparah di Pasar Kumbasari dan Jalan Raya Pura Demak. Ada sekitar 200 pedagang di Pasar Kumbasari yang terdampak.

"Yang parah itu Denpasar. Ada 43 titik tapi yang parah ada dua wilayah Pasar Kumbasari dan Jalan Raya Pura Demak. Kemudian ada beberapa juga di Kabupaten Badung," ujarnya.

Begitu pula di NTT, terdapat lima desa terdampak dari bencana banjir tersebut antara lain Desa Maukeli, Desa Lokalobo, Desa Ae Woe, Desa Loda Ola, dan Wolo Kisa.

BMKG: Bukan Hujan Biasa

mendorong akumulasi massa udara lembap dari Samudra Hindia dan Laut Jawa yang memicu hujan lebat di wilayah tropis, termasuk Indonesia," jelas Siswanto.

BMKG menambahkan, kondisi atmosfer Indonesia saat ini lebih hangat dari biasanya, sehingga uap air di udara melimpah. "Ini memperlihatkan peran perubahan iklim dalam meningkatkan intensitas hujan ekstrem di Indonesia," imbuhnya.

Balai Besar MKG Wilayah III merilis peringatan dini bahwa dalam tiga hari ke depan masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Bali. BMKG meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti informasi cuaca terkini dari kanal resmi.

Disebut, sebagian besar kabupaten kota di Bali mengalami curah hujan lebat hingga ekstrem di atas 150 milimeter per hari, pada periode 9-10 September 2025.

"Dalam tiga hari ke depan masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar

wilayah Bali," kata Kepala BBMKG Wilayah III Cahyo Nugroho di Denpasar, Rabu (10/09/2025).

Berdasarkan hasil pantauan, hujan turun sejak Selasa (9/9/2025) di Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Klungkung dan Karangasem dalam kategori lebat di atas 50 milimeter (mm) per hari hingga kategori ekstrem di atas 150 mm.

Hujan tersebut bahkan berlanjut hingga Rabu pagi ini, hingga menyebabkan bencana hidrometeorologi, di antaranya banjir di sejumlah titik.

Dia menambahkan, dari analisis dinamika atmosfer menunjukkan kondisi ekstrem tersebut dipicu oleh aktif gelombang ekuatorial Rossby yang berdampak memicu pertumbuhan awan konvektif atau awan hujan.

Selain itu, ada juga kelembaban udara dalam kategori lembab hingga lapisan 200 milibar (mb) atau hingga 12.000 meter.

"Kondisi itu mendukung pembentukan awan konvektif dengan puncak awan yang tinggi sehingga menimbulkan hujan lebat disertai kilat atau petir," ucapnya. (wid,rls,ant/dya)

WALI KOTA MALANG BAKAL BUKA-BUKAAN DATA HADAPI SOMASI DAN AUDIT PASAR



(Ilustrasi) Kondisi bangunan di Pasar Besar Malang sudah tidak layak berdasarkan uji forensik Teknik Sipil UB. (Santi/Lentera)

MALANG- Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan siap meladeni somasi Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang (Hippama) dan usulan audit pasar dari Komisi B DPRD.

Wahyu memastikan akan buka-bukaan data pengelolaan retribusi secara transparan. Sekaligus menjelaskan tidak seluruh pedagang, terutama di Pasar Besar Malang (PBM) ditarik retribusi, sehingga target

penerimaan belum sesuai dengan potensi riil.

"Ya, gak apa-apa. Kami hadapi. Kami akan berikan datanya. Kami akan jelaskan kepada mereka. Somasi ini kan hak mereka. Tetapi yang jelas kami akan berikan data melalui bagian hukum," ujar Wahyu, Rabu (10/9/2025).

Diketahui, Hippama menilai retribusi yang rutin dibayarkan pedagang tidak berwujud pada kelayakan pasar.

Sebagai bentuk protes, pada Senin (25/8/2025) lalu, Hippama bersama Lembaga Banyuan Hukum (LBH) dan Advokasi Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, melayangkan somasi bernomor 003/III.28/0/2025 ke Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Malang.

Sementara itu, menanggapi usulan Komisi B DPRD Kota Malang untuk dilakukannya audit pasar, Wahyu menegaskan tidak keberatan dengan

hal tersebut. Wahyu menilai audit merupakan hal terbuka, meski sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan.

Menurut Wahyu, BPK juga telah menegaskan bahwa pengelolaan pajak dan retribusi di Kota Malang berjalan sesuai ketentuan. Namun, pihaknya mengaku tetap membuka ruang apabila DPRD menghendaki adanya audit tambahan.

"Tetapi BPK kan sudah jelas, bahwa dalam rangka pengelolaan pajak dan retribusi, sudah sesuai dengan ketentuan," katanya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, usulan audit pasar dari legislatif ini muncul karena target retribusi dinilai tidak sebanding dengan potensi riil. Komisi B menduga adanya kebocoran dalam pungutan, mengingat potensi retribusi pasar bisa mencapai Rp16,5 miliar. Sedangkan target yang diproyeksikan baru sekitar Rp8,5 miliar.

Menanggapi hal itu, Wahyu menyampaikan, pencapaian retribusi masih berproses dan optimistis dapat dioptimalkan. Ditambahkannya, tidak semua pedagang khususnya di Pasar

Besar dikenai pungutan retribusi, mengingat kondisi lapangan yang tidak sudah tidak layak.

"Karena kan kami kasian juga. Kondisinya seperti itu, masak tetap ditarik. Beda lagi dengan pedagang yang menempati bagian pasar yang kondisinya masih baik, layak, itu ditarik," jelas Wahyu.

Pasar Besar Malang sendiri kini dalam kondisi memprihatinkan. Di area dalam, khususnya bagian pedagang sayur, daging, dan ikan, penerangan minim, jalan rusak, dan fasilitas kurang memadai.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, sebelumnya juga menyoroti permasalahan serius di pasar tersebut. Terlebih menurut Bayu, kajian akademik dari Teknik Sipil Universitas Brawijaya (UB) menyebut struktur bangunan PBM sudah tidak stabil dan tidak aman.

Kondisi pasar makin disorot setelah peristiwa pada awal Juli 2025 lalu, ketika dua blok tembok di lantai 3 PBM ambrol. Satu blok runtuh menimpa seorang pedagang hingga mengalami luka, meski beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. (Santi/Dya)

PEMKAB MALANG BELUM KEMBALIKAN JABATAN EKS KADINKES MESKI KASASI DITOLAK, KENAPA?

MALANG - Meski Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi Bupati Malang, Sanusi, namun pengembalian jabatan eks Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo, hingga kini belum direalisasikan. Pemerintah Kabupaten (Pekab) beralasan masih menunggu rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

Koordinator Tim Penilai Kinerja (TPK) Pemkab Malang, Tomie Herawanto, menyampaikan pihaknya belum dapat menindaklanjuti putusan MA sebelum adanya rekomendasi resmi dari BKN.

"Saat ini masih menunggu rekomendasi dari BKN. Semoga segera diterbitkan, sehingga Pemkab Malang dapat menindaklanjuti putusan MA," ujar Tomie, dikutip pada Rabu (10/9/2025).

Disinggung terkait apakah jabatan baru eks Kadinkes Wiyanto akan

tertuang dalam rekomendasi BKN, Tomie tidak memberikan jawaban pasti. "Insyaallah seperti itu (sudah tercantum jabatan baru), menyesuaikan putusan MA," katanya singkat.

Diketahui, dalam putusan kasasi, MA memerintahkan Bupati Malang selaku terbanding untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Nomor 800.1.6.3/148/35.07.405/2024 tentang pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, tertanggal 27 Maret 2024, atas nama Wiyanto Wijoyo.

MA juga mewajibkan penerbitan SK baru yang merehabilitasi serta mengangkat kembali Wiyanto dalam jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang atau jabatan lain yang setara.

Dalam pemberitaan sebelumnya, kasus pencopotan Wiyanto dari jabatan Kadinkes bermula dari pelaksanaan program Universal

Health Coverage (UHC) pada Februari 2023.

Saat itu, sekitar 25 persen penduduk Kabupaten Malang belum tercatat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Untuk memenuhi target UHC, warga yang belum tercover harus terdaftar dalam segmen Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). Namun, data baru dimasukkan pada Februari 2023 sehingga kebutuhan anggaran tidak tercantum dalam APBD 2023. Dan baru direncanakan masuk pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

Kondisi itu membuat Pemkab Malang menanggung tunggakan pembayaran ke BPJS Kesehatan. Dalam



Pj Sekda sekaligus Ketua TPK Pemkab Malang, Tomie Herawanto. (dok. Ist)

kurun tiga bulan, utang tersebut mencapai Rp87 miliar, sedangkan anggaran yang tersedia hanya Rp80 miliar untuk satu tahun penuh. (Santi/Dya)

NEPAL MENCEKAM, PM DAN PRESIDEN LENGSER BERSAMA

Istri Mantan Perdana Menteri Tewas saat Rumahnya Dibakar

Perdana Menteri Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, terpaksa meletakkan jabatannya setelah gelombang demonstrasi besar-besaran yang melibatkan ribuan generasi Z pada Selasa (9/9/2025).



Istana Singha Durbar, yang merupakan gedung DPR dan pemerintahan Nepal, dibakar dalam demonstrasi di Kathmandu, pada Selasa (9/9/2025). (Foto: EPA)

Aksi protes yang dipicu oleh kebijakan pemerintah melarang media sosial berubah menjadi bentrokan keras, menewaskan 19 orang serta melukai ratusan lainnya.

Dikutip dari Reuters pada Rabu (10/9/2025), kerusuhan ini digambarkan sebagai yang paling parah dalam beberapa dekade terakhir di negara yang terletak di antara India dan China. Nepal sendiri masih berjuang menghadapi ketidakstabilan politik dan ekonomi sejak gelombang protes yang menggulingkan monarki pada 2008 silam.

"Ini bukan hanya tentang pemblokiran media sosial, ini tentang kepercayaan, korupsi, dan generasi yang menolak untuk diam," dikutip dari Kathmandu Post pada Rabu

(10/9/2025).

Diketahui, PM Nepal KP Sharma Oli mengumumkan pengunduran diri pasca demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota. Dalam surat pengunduran dirinya, Oli mengatakan keputusan itu untuk memfasilitasi solusi atas masalah yang terjadi.

"Mempertimbangkan situasi yang tidak menguntungkan di negara ini, saya memutuskan mengundurkan diri hari ini untuk memfasilitasi solusi atas masalah ini dan membantu mengatasi hal ini secara politis sesuai dengan konstitusi," kata Oli pada Selasa (9/9/2025).

Keputusan itu juga disampaikan beberapa jam setelah kediaman Oli dibakar massa.

Tak lama setelah Oli mundur,

Presiden Ram Chandra Poudel juga mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri PM dan Presiden membuat Nepal tanpa pemimpin eksekutif di tengah situasi yang semakin chaos ini.

Selain itu, unjuk rasa berujung bentrokan ini menyebabkan 19 orang tewas dan ratusan mengalami luka-luka.

Dikutip dari Al Jazeera, polisi menembak mati 17 orang di ibu kota Kathmandu, sementara dua orang lainnya dilaporkan tewas di distrik Sunsari, Nepal timur.

Korban tewas diduga setelah polisi menggunakan peluru karet, gas air mata, meriam air, hingga pentungan untuk menghalau para pengunjuk rasa yang mencoba

menerobos pagar kawat berduri untuk masuk ke Gedung Parlemen.

"Saya datang ke sana untuk aksi damai, tetapi pemerintah menggunakan kekerasan," kata peserta aksi Iman Magar, yang terkena tembakan di lengan kanan.

"Itu bukan peluru karet, melainkan peluru logam, dan itu melukai tangan saya. Dokter bilang saya perlu dioperasi," imbuhnya.

Amnesty International juga mengonfirmasi bahwa pihak berwenang Nepal menggunakan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa.

Sementara itu, selama unjuk rasa ini kediaman pribadi PM Oli dan Presiden Poudel dibakar massa. Dalam sejumlah video yang beredar di medsos, menunjukkan aksi-aksi vandalisme di kediaman PM dan presiden.

Rumah mantan PM Nepal Pushpa Kamal Dahal dan Sher Bahadur Deuba juga turut menjadi sasaran amukan massa. Kediaman Menteri Energi Nepal Deepak Khadka juga rusak karena digerus massa.

Serta istri mantan Perdana Menteri Nepal Jhala Nath Khanal, Rajyalaxmi Chitrakar, tewas usai menderita luka bakar parah saat kediamannya di Kathmandu dibakar oleh massa yang ricuh. (Reuters, AFP, Al Jazeera, Kathmandu Post, ist/nei)

Paris Juga Chaos Buntut Ancaman Sabotase

Ibu kota Prancis menghadapi ketegangan pada 10 September akibat gerakan "Blokir semua" yang viral di media sosial. Kepala polisi Paris, Laurent Nuñez, memperingatkan potensi gangguan besar pada transportasi dan infrastruktur.

Gerakan ini berbeda dari demonstrasi biasa karena tanpa penyelenggara jelas dan tidak terstruktur, sehingga menyulitkan aparat menilai risiko. Beberapa aksi diperkirakan dilakukan kelompok sayap kiri radikal di seluruh wilayah Île-de-France.

Pihak berwenang fokus memantau titik-titik kritis seperti jalan lingkar

Paris dan stasiun kereta utama, termasuk Gare du Nord, Gare de Lyon, dan Saint-Lazare, yang dilalui ratusan ribu penumpang setiap hari.

Selain itu, Bandara Roissy dan Orly, serta transportasi umum Paris, khususnya jalur RER, menjadi fokus keamanan karena berpotensi terganggu akibat aksi industri dan mobilisasi protes.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, Laurent Nuñez menyebutkan ancaman terhadap depot-depot minyak dan infrastruktur logistik. "Kami memperkirakan adanya operasi tabrak lari, blokade, dan bahkan upaya sabotase", ia memperingatkan. Potensi eskalasi dalam modus-modus aksi ini merupakan tantangan keamanan yang besar bagi pihak berwenang.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah memobilisasi 80.000 polisi dan gendarme secara nasional, dengan penguatan jaringan polisi di Île-de-France, termasuk malam hari, untuk menjamin respons cepat

terhadap potensi insiden.

"Kami akan melakukan intervensi secara sistematis untuk mencegah kerusakan. Kami tidak akan mentolerir serangan apa pun terhadap infrastruktur penting", tegas kepala polisi. Oleh karena itu, masyarakat Île-de-France harus terbiasa dengan kehadiran polisi yang sangat terlihat di sekitar persimpangan lalu lintas utama, stasiun kereta api utama, dan bandara.

Mobilisasi ini disertai dengan peningkatan pengawasan terhadap jejaring sosial, di mana seruan untuk melakukan aksi semakin meningkat. Pihak berwenang berusaha mengantisipasi titik-titik potensial untuk berkumpul, meskipun kurangnya

Seorang polisi menyingkirkan penghalang yang dipasang demonstran dalam aksi "Bloquons Tout" yang memblokir lalu lintas di Nantes, Prancis, Rabu (10/9/2025). (Foto: Reuters)



organisasi yang terstruktur membuat hal ini menjadi latihan yang sulit.

Selain aksi sempalan, beberapa demonstrasi tradisional diperkirakan berlangsung di Place de la République, namun pihak berwenang lebih khawatir terhadap aksi tak terduga dari kelompok kecil yang sulit dikontrol. (AP News, Reuters, ist/nei)

Indonesia Darurat Seblak

Pakar Gizi Ingatkan Ancaman Malnutrisi

Tagar "Indonesia darurat seblak" ramai diperbincangkan usai unggahan seorang dokter di TikTok viral. Dalam unggahannya, ia menceritakan kasus seorang remaja yang hanya mengonsumsi seblak setiap hari tanpa asupan makanan lain.

Seorang pasien perempuan berusia 21 tahun dilaporkan mengalami nyeri perut parah dan kehilangan nafsu makan selama sepekan terakhir. Sebelum mendapatkan perawatan, kondisinya disebut sangat lemah hingga tidak sanggup bangun dari tempat tidur.

Seorang dokter umum yang berpraktik di Bandung Barat mengungkapkan bahwa ia sudah beberapa kali menjumpai kasus serupa. Dialog antara dr. Mariska Haris, pemilik akun TikTok tersebut, dengan pasiennya pun ramai mencuri perhatian publik.

Dokter Mariska bertanya kepada pasien mengenai kebiasaan makannya. "Makan seblak berapa kali sehari?" tanyanya. Pasien pun menjawab, "Sekali, dua kali sehari." Dokter kemudian melanjutkan, "Kalau nasinya berapa kali sehari?" Pasien remaja itu menjawab, "Kalau lagi mau sekali sehari." Dokter kembali bertanya, "Kalau nggak mau?" dan pasien menimpali, "Nggak makan sama sekali."

Ahli gizi dr Tan Shot Yen ikut buka suara menanggapi fenomena tersebut. Ia menilai bahan utama seblak yakni kerupuk bukan hanya tidak bernutrisi, tetapi tinggi kandungan garam.

"Masalah seblak ini kan ada di bahan utamanya, kerupuk. Kerupuk bukan hanya terbuat dari tepung yang miskin gizi, tetapi juga tinggi garam," sebut dr Tan saat dihubungi detikcom Kamis (4/9/2025).

Walhasil, masyarakat Indonesia banyak terjebak dengan jajanan-jajanan tidak sehat, termasuk juga gorengan.

"Konsumen seblak biasanya juga bukan pemakan menu sehat. Jadi akumulasi pangan amburadul membuat masalah gizi jangka panjang," tutur dr Tan.

Tidak heran, Indonesia menghadapi beban kasus penyakit gizi kronis yang relatif tinggi. Ia juga tidak menampik kemungkinan fenomena tersebut menjadi penyumbang kasus stunting terus bertambah. Mengingat, bekal remaja untuk bisa menjadi calon ibu di masa mendatang gizi yang

tercukupi dan bebas dari anemia. "Sementara mengonsumsi seblak apalagi dalam jangka panjang, tidak ada asupan nutrisi apapun, bisa memicu anemia, keropos tulang, gangguan haid, hingga malnutrisi di depan mata," pungkasnya.

Apa Itu Seblak?

Seblak adalah makanan berbahan dasar kerupuk mentah yang direbus, lalu dimasak dengan bumbu cabai, bawang putih, kencur, dan aneka topping seperti ceker, sosis, bakso, hingga seafood. Rasanya pedas-gurih dan teksturnya kenyal, membuat banyak orang ketagihan. Kelontong

Kini, seblak hadir dalam berbagai varian, mulai dari seblak kering, seblak instan dalam kemasan, hingga seblak kuah dengan level pedas ekstrem. Popularitasnya yang tinggi membuat seblak semakin mudah ditemui, baik di pinggir jalan maupun restoran modern. Jika menjadi kebiasaan, hal ini dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Berikut bahayanya sering makan seblak setiap hari

Memicu Iritasi Lambung

Mengonsumsi cabai dalam jumlah besar dapat memicu masalah pencernaan seperti maag kambuh, rasa perih di lambung, hingga refluks asam lambung (GERD). Untuk menjaga kesehatan tubuh, selain mengatur pola makan dan membatasi makanan pedas, penting juga mempertimbangkan asupan tambahan seperti vitamin dan suplemen yang dapat membantu memperkuat daya tahan tubuh serta mendukung fungsi organ secara optimal.

Tinggi Garam dan Penyedap Rasa

Seblak umumnya memiliki kandungan sodium yang cukup tinggi, dan jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, termasuk hipertensi serta gangguan pada fungsi ginjal akibat beban kerja organ yang semakin berat dalam menyaring garam berlebih dari tubuh.

Gangguan Pencernaan

Kerupuk yang direbus dan dikonsumsi dalam jumlah berlebihan dapat menimbulkan gangguan pencernaan seperti kembung, diare, atau bahkan sembelit, karena kandungan utamanya

yang berupa tepung dan minyak sulit dicerna oleh tubuh.

Risiko Dehidrasi

Makanan pedas dapat merangsang tubuh untuk mengeluarkan lebih banyak cairan melalui keringat maupun buang air besar, sehingga jika dikonsumsi berlebihan bisa menyebabkan dehidrasi dan membuat tubuh lebih mudah kekurangan cairan.

Kecanduan Pedas

Sensasi pedas yang menimbulkan efek "nagih" sering membuat seseorang sulit berhenti makan, sehingga konsumsi seblak dapat menjadi berlebihan tanpa disadari dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan jika berlangsung terus-menerus.

Tips Aman Menikmati Seblak

Untuk menjaga kesehatan, sebaiknya jangan mengonsumsi seblak setiap hari, cukup dibatasi maksimal 1-2 kali seminggu. Seblak umumnya mengandung garam, minyak, dan penyedap dalam jumlah tinggi yang bisa memicu gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi, hingga obesitas bila dikonsumsi

msi berlebihan. Pilih tingkat kepedasan yang wajar agar tidak merusak lambung, dan hindari makan seblak saat perut kosong—terutama bagi penderita maag—karena dapat menimbulkan nyeri perut atau mual.

Supaya lebih bergizi, tambahkan bahan sehat seperti sayuran (sawi, kol, wortel) dan sumber protein seperti telur, tahu, tempe, atau ayam. Dengan begitu, seblak tidak hanya lebih nikmat,

Untuk menjaga kesehatan, sebaiknya jangan mengonsumsi seblak setiap hari, cukup dibatasi maksimal 1-2 kali seminggu. Seblak umumnya mengandung garam, minyak, dan penyedap dalam jumlah tinggi yang bisa memicu gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi, hingga obesitas bila dikonsumsi berlebihan. Pilih tingkat kepedasan yang wajar agar tidak merusak lambung, dan hindari makan seblak saat perut kosong—terutama bagi penderita maag—karena dapat menimbulkan nyeri perut, mual, serta rasa tidak nyaman. [nei,ist/dya](#)



Galaxy Watch 8 Jadi Wearable Andalan untuk Kualitas Tidur

Samsung memperkenalkan Galaxy Watch8 sebagai perangkat unggulan untuk mendukung kualitas tidur dalam ajang World Sleep Congress 2025 di Singapura pada 5–10 September 2025. Acara tersebut menjadi forum ilmiah internasional bergengsi di bidang ilmu tidur dan ritme sirkadian, menghadirkan lebih dari 350 jam presentasi dari para pakar dunia.

"Tujuan kami di sini adalah untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana inovasi Samsung mendukung kesehatan yang lebih baik secara keseluruhan dan kualitas tidur yang lebih baik," jelas Platform Architect and Project Lead Digital Health team Samsung Electronic, Moon Bae Song, dalam acara yang berlangsung di Suntec City, Singapura, Selasa (9/9/2025).

Galaxy Watch 8 hadir dengan beragam fitur tidur, mulai dari sleep coaching hingga survei pola tidur unik yang dibagi dalam delapan karakter hewan, seperti singa, penguin, hingga buaya. Dari hasil analisis tersebut, pengguna akan memperoleh panduan harian yang praktis dan mudah diikuti, mencakup jadwal tidur, rutinitas malam, hingga tips

sederhana untuk menjaga kualitas istirahat tetap sehat dan konsisten.

Samsung juga memaparkan teknologi Samsung Health SDK yang memungkinkan pengembangan riset kesehatan digital. SDK ini mendukung lebih dari 23 jenis data kesehatan, termasuk aktivitas, nutrisi, biometrik, hingga pola tidur yang semuanya bisa diintegrasikan dengan digital therapeutics, remote patient monitoring, hingga penelitian medis.

"Semua bisa diakses dari jam tangan yang bukan sekadar pintar, sebab versi ini memiliki kemampuan sensor kesehatan seperti PPG, ECG, detak jantung, SpO₂, hingga suhu tubuh," sambungnya.

Bantu Evaluasi Tidur Pengguna

Adapun Dokter Spesialis Kesehatan Tidur, dr. Andreas Prasadja, yang turut menghadiri kongres itu, menilai kesadaran masyarakat Indonesia terhadap tidur sehat meningkat berkat teknologi wearable. Gen Z menjadi generasi yang paling sadar dengan kesehatan tidurnya.

Menurut Andreas, tidur kini sama

pentingnya dengan nutrisi dan olahraga. Dia masuk dalam paradigma atau pilar kesehatan saat ini.

"Triumvirate of health itu begini, yang menjadi dasar adalah kesehatan tidur. Tanpa kesehatan tidur yang baik, mau jaga makan seperti apa pun, tetap tidak bisa," tegasnya kepada wartawan di lokasi.

Ia menambahkan, gangguan tidur yang berkepanjangan bisa berdampak serius pada kesehatan jantung. Menurutnya, tidur adalah kunci yang memengaruhi bukan hanya dapat menyebabkan penyakit apabila tidak terpenuhi, tetapi juga salah satu sumber penyebab stres.

Badan stres menyebabkan zat oksidan dalam tubuh naik. Hal ini dapat meningkatkan risiko stroke, penyakit jantung, hingga tekanan darah tinggi.

Oleh karena itu, Andreas menilai perangkat seperti Galaxy Watch 8 membantu masyarakat melakukan evaluasi tidur harian, salah satunya menekankan pentingnya kebiasaan sederhana untuk menjaga kualitas tidur.

"Jangan lakukan late-night snacking, hentikan konsumsi kafein setidaknya 12 jam sebelum tidur, dan biasakan tidur dalam

ruangan gelap agar produksi melatonin optimal," jelasnya.

Menurutnya, smartwatch macam Galaxy Watch 8 bisa membantu memberi pengingat praktis atas kebiasaan tersebut, sehingga masyarakat lebih disiplin dalam menjaga pola istirahat.

Dalam kegiatan ini pun, kehadiran Samsung lewat Galaxy Watch8 Series menegaskan raksaksa elektronik dan teknologi asal Korea Selatan ini bukan sekadar perangkat wearable, melainkan bagian dari ekosistem kesehatan preventif yang mendukung terbentuknya kualitas hidup lebih baik. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | MOJOKERTO: NUR HIDAYAH | LAMONGAN: L HANDI | BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA | KEDIRI: GATOT SUNARKO | JOMBANG : SUTONO | PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO : IMAN SANTOSO | BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO | MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN | TRENGGALEK: TINA W | NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | DKI JAKARTA: FUAD HASSAN | LOMBOK BARAT: MUHAYYAN | PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | TELP 03187854491 | PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL.

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MEDIA TERVERIFIKASI

No Eye-Makeup Look

Jadi Tren Kecantikan 2025

Setelah sekian lama tren no-makeup makeup menjadi dominan, tahun 2025 melahirkan babak baru di dunia kecantikan dengan hadirnya no eye-makeup look. Sesuai namanya, tren ini menghapus penggunaan riasan mata yang biasanya dianggap penting, seperti eyeliner, maskara, hingga bulu mata palsu.

Fenomena ini mulai mencuri perhatian publik saat Winter, member aespa, muncul di bandara Tokyo pada Juli 2025 dengan tampilan wajah flawless. Bibir dan pipinya terlihat natural, sementara bagian mata dibiarkan tanpa sentuhan makeup sama sekali. Penampilan sederhana namun berani tersebut langsung menjadi perbincangan dan viral di berbagai media sosial.

Penampilan Winter itu turut diliput oleh media internasional seperti Koreaboo dan Allkpop, sehingga semakin memperluas popularitas tren ini. Netizen membanjiri pujian, menilai kecantikannya tampak "lebih lembut, segar, dan alami," serta menjadikannya bukti bahwa kesederhanaan mampu menghadirkan pesona tersendiri di dunia hiburan K-Pop.

Mengapa Tren Ini Naik Daun?

Ada alasan mengapa tren ini begitu cepat diterima. Di tengah gaya hidup modern yang serba cepat, tampilan tanpa riasan mata terasa praktis dan mudah diaplikasikan sehari-hari. Selain itu, mengurangi penggunaan produk di area mata memberi manfaat bagi kesehatan bulu mata dan kelopak yang sensitif.

Dalam iklim panas seperti di Indonesia, tampilan ini juga terasa relevan karena bebas dari risiko maskara luntur akibat keringat atau kelembapan. Perubahan ini sejalan dengan fenomena global seperti ghost lashes dan no-mascara look yang tengah ramai diperbincangkan di Vogue, InStyle, dan Marie Claire. Semuanya mengarah pada satu hal: kecantikan yang lebih ringan, effortless, sekaligus ramah kulit.

Tren ini juga sejalan dengan tren "No Mascara Look" yang dalam setahun terakhir populer. Menurut Makeup Artist Sophia Escobedo, no mascara look menciptakan tampilan wajah yang elegan, berfokus hanya pada fitur-fitur wajah.

"Tampilan wajah yang full-face tapi tanpa maskara akan memberikan kesan sangat elegan karena fokus perhatian secara alami beralih ke tulang pipi, garis rahang, dan struktur wajah secara keseluruhan, sambil tetap terlihat rapi dan menarik," kata Escobedo, dikutip dari Who What Wear.

Dari Winter Aespa ke Jennie BLACKPINK

Winter bukan satu-satunya artis yang memopulerkan gaya riasan alami tanpa riasan mata yang berat. Penyanyi populer IU dan Suzy sudah lama dikenal kerap tampil menawan dengan gaya sederhana tersebut, membuktikan bahwa kecantikan natural tetap bisa memikat tanpa perlu polesan berlebihan di area mata.

Tren ini juga diperkuat oleh Jennie BLACKPINK yang memperlihatkan no-mascara look lewat unggahan

Instagram-nya. Ia memadukan pipi merona dengan eyeliner tipis yang justru semakin menonjolkan pesona alaminya. Tak hanya artis Korea, nama-nama besar internasional seperti Hailey Bieber dan Millie Bobby Brown juga ikut mengadopsi tampilan ini, menegaskan bahwa gaya riasan natural kini semakin menjadi pilihan bintang dunia.

Tips No Eye Makeup Look

Meski tampak sederhana, menciptakan no eye-makeup look yang maksimal membutuhkan seni tersendiri. Fokus utamanya adalah menjaga kulit tetap sehat dan glowing, karena kulit yang terawat akan menjadi pusat perhatian utama. Selain itu, alis yang rapi mampu membingkai wajah dengan baik, sementara pipi yang diberi sentuhan blush on lembut atau bronzer dapat menambah dimensi alami pada tampilan.

Tak kalah penting, bibir juga memegang peran besar dalam melengkapi gaya ini. Penggunaan lip tint atau lip balm berwarna sudah cukup untuk menciptakan kesan segar tanpa terlihat berlebihan. Pemilihan warna yang natural biasanya menjadi kunci agar keseluruhan tampilan tetap selaras dengan konsep sederhana namun menawan.

Sementara itu, meski tidak menggunakan riasan tebal di area mata, bulu mata tetap bisa dirawat agar terlihat sehat dan terdefinisi. Perawatan dengan lash serum, minyak alami seperti castor oil, atau penggunaan clear mascara mampu memberikan efek lift halus tanpa menambahkan pigmen. Dengan

kombinasi perawatan tersebut, no eye-makeup look dapat tampil lebih maksimal sekaligus mempertahankan kesan alami.

Peluang Industri Kecantikan

Tren no eye-makeup look tidak sekadar hadir sebagai gaya, tetapi juga membuka peluang baru bagi industri kecantikan. Banyak brand mulai berinovasi dengan menghadirkan produk-produk yang mendukung tampilan alami, seperti clear mascara, brown mascara dengan hasil lembut, hingga lash serum yang menutrisi bulu mata. Bahkan, kini semakin populer produk hybrid skincare-makeup yang tidak hanya mempercantik secara instan, tetapi juga memberikan manfaat perawatan jangka panjang.

Permintaan pasar pun ikut berkembang seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya tampilan ringan dan ramah kulit. Hal ini mendorong industri untuk terus berinovasi, menciptakan produk yang menyeimbangkan fungsi estetika dan kesehatan kulit ke depan.

(nei,ist/dya)



Menkeu Akan Tarik ...dari hal 1

Menkeu Purbaya mengatakan saat ini ada sekitar Rp 425 triliun 'dana nganggur' di bank sentral. Dana tersebut di antaranya Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN). SAL ini berada rekening pemerintah di BI.

"Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa?" kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Rabu (10/9/2025).

"Saya sudah lapor ke Presiden akan taruh uang ke perekonomian. Sekarang punya dana cash di BI Rp 425 triliun. besok saya taruh Rp 200 triliun di perbankan," katanya.

Purbaya menilai apabila terlalu banyak uang mengendap di BI maka tidak mengalir ke sektor riil. Sementara uang yang dibiarkan itu merupakan anggaran pemerintah yang notabene berasal dari penerimaan negara seperti pajak.

Purbaya juga menjelaskan uang segar yang disuntikkan ke sistem perbankan sebagai salah satu bagian penting dari sistem perekonomian pasti akan dikelola lebih lanjut. "Bank biasanya akan bergerak untuk mencari laba atau return dan salah satu caranya adalah menawarkan kredit ke masyarakat," katanya.

Dia juga mengatakan, terkait hal ini telah mendiskusikannya dengan deputi senior Bank Indonesia. Dia juga meminta supaya BI tidak menyerap uang tersebut sehingga bisa dipakai untuk menjadi likuiditas di perbankan.

"Kalau itu masuk ke sistem dan saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi," kata Purbaya.

Purbaya mengatakan Indonesia sempat mengalami pengetatan likuiditas pada 2024. Dia menilai likuiditas perekonomian "dibuat ketat" oleh pemerintah dan BI saat itu dengan suku bunga tinggi, kebijakan penarikan pajak yang ekspansif, tanpa disertai dengan kebijakan belanja yang tepat waktu.

"Yang saya enggak tahu Mei jatuh lagi, Juni, Juli, Agustus jatuh ke 0% jadi periode perlambatan ekonomi yang sempat 2024 gara-gara uang ketat tadi dipulihkan sedikit, tapi belum pulih penuh di rem lagi ekonominya, itu dari sisi fiskal dan moneter," ucap Purbaya.

"Pemerintah karena terlambat membelanjakan anggaran, membelanjakan APBN nya, uangnya kan tetap di bank sentral, rajin narik pajak, enggak apa masuk ke bank sentral kalau dibelanjakan lagi, enggak apa, tapi kan enggak, kita santai-santai kering sistemnya, bank sentral kita juga sama," tegasnya.

Alhasil, ekonomi melambat mulai 2023 hingga jelang kuartal II-2024. Namun, kesalahan kebijakan itu malah direspons dengan menyalahkan tekanan ekonomi global saat itu. Purbaya menekankan, padahal roda perekonomian Indonesia mayoritas digerakkan oleh konsumsi domestik.

"Kita semua tunjuk ini gara-gara global, padahal ada kebijakan dalam negeri yang salah juga, yang utamanya mengganggu kita karena 90% perekonomian kita di drive domestik demand," ucapnya.

Dia menambahkan bahwa sistem finansial Indonesia agak kering, sehingga ekonominya melambat. "Makanya dua tahun terakhir orang banyak cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal," tambahnya.

Dia mengungkapkan gejala perekonomian global sebenarnya bukan satu-satunya faktor yang dapat membuat ekonomi nasional lambat. Namun ada juga kesalahan kebijakan fiskal ataupun moneter di dalam negeri.

"Menurutnya pertumbuhan ekonomi bisa digencet dengan kebijakan fiskal dan moneter yang selaras. Dari sisi fiskal, Purbaya berjanji akan mendorong belanja pemerintah dan memastikan tidak ada lagi penyerapan anggaran yang lambat.

"Yang bapak-bapak DPR rasakan kemarin demo, itu karena ada tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri, yang sebetulnya itu kita kuasai," ujarnya.

Purbaya memastikan anggaran pemerintah ini tidak akan dibiarkan mengendap. Dia yakin bank komersial akan terdorong untuk mencari imbal hasil lebih tinggi karena ada biaya dari dana tersebut. Mekanisme pasar inilah yang diharapkan bisa memacu penyaluran kredit.

"Jadi saya memaksa market mechanism berjalan dengan memberi senjata ke mereka. Jadi memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja supaya dapat return yang tinggi," tegas Purbaya.

Sementara itu, juru bicara BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan bahwa bank sentral juga menambah likuiditas dengan membeli obligasi pemerintah di pasar sekunder, serta perjanjian "burden sharing" baru dengan pemerintah yang akan menaikkan suku bunga simpanan

pemerintah.

Dalam kesempatan itu, selain memberikan paparan arah kebijakan fiskal tahun depan, Menkeu Purbaya juga menyampaikan lima program utama Kementerian Keuangan yang menjadi tulang punggung pengelolaan keuangan negara.

Lima program strategis tersebut meliputi: pertama, program perumusan kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi. Program ini diarahkan untuk menghasilkan kebijakan fiskal yang proaktif sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam tata kelola ekonomi global.

Kedua, program pengelolaan penerimaan negara. Program ini menitikberatkan pada optimalisasi pendapatan negara melalui perpajakan, kepabeanan, cukai, dan PNPB dengan dukungan transformasi digital.

Ketiga, program pengelolaan belanja negara. Menkeu Purbaya mengatakan program ini berfokus pada peningkatan kualitas belanja yang adil, efektif, dan produktif, termasuk sinergi belanja pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis.

Kemudian, yang keempat adalah program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko. Arah program ini untuk mewujudkan APBN yang akuntabel, inovatif, dan berkelanjutan, melalui pengelolaan kas, aset, pembiayaan, serta risiko yang lebih optimal.

Dan yang kelima Program Dukungan Manajemen. Program ini menekankan pada penguatan manajemen strategis, transformasi digital, serta peningkatan kualitas SDM keuangan negara, sehingga seluruh unit Kemenkeu dapat menjalankan tugas dengan efektif.

Dia menandakan bahwa seluruh program dilaksanakan secara kolaboratif oleh unit eselon I Kemenkeu untuk memastikan tercapainya kinerja fiskal yang adaptif dan berkelanjutan.

Menkeu menegaskan bahwa kelima program ini menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung transformasi ekonomi nasional.

"Kami percaya bahwa alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan peran strategis Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menekankan pentingnya Kementerian Keuangan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan

berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Saya berharap betul kinerja Kemenkeu ke depan dalam rangka mengelola APBN ini benar-benar bisa menunjukkan empati yang besar kepada masyarakat," ujar Hanif.

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu mengingatkan agar kinerja Kementerian Keuangan tidak semata bertumpu pada angka-angka indah dalam laporan, apalagi sampai mengabaikan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

Menurutnya, dalam setiap kebijakan fiskal pasti terdapat dinamika politik, namun pemerintah tetap harus fokus pada persoalan mendasar yang dihadapi rakyat.

"Bahwa misalnya ada politiknya atau segala macam pastilah dalam konteks seperti ini akan muncul, tetapi ada underline problem yang harus kita selesaikan, baik melalui kebijakan maupun program pemerintah," tegas Hanif.

Lebih lanjut, Hanif menekankan pentingnya memastikan setiap program yang telah dirancang Kementerian Keuangan benar-benar menghasilkan manfaat nyata. Ia berharap output dan outcome dari kebijakan fiskal dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam laporan kinerja.

"Jadi saya tegaskan, mohon program-program yang sudah disusun Kemenkeu ini benar-benar bisa dilihat output-outcome-nya dan bisa dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya.

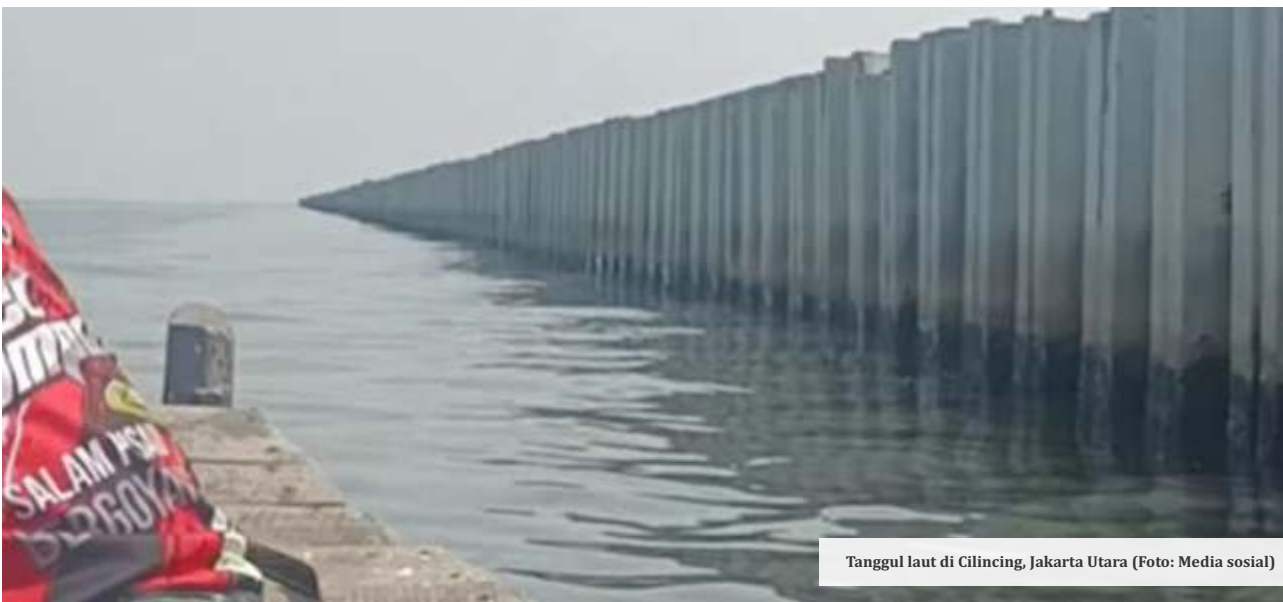
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, memberikan pandangan berbeda. Dia lebih menyoroti implementasi digitalisasi dan integrasi data di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang telah memanfaatkan sejumlah aplikasi digital seperti Cortex, Ceisa, dan Simbara dalam mendukung pengelolaan keuangan negara. Namun, ia menekankan pentingnya sistem-sistem tersebut benar-benar terintegrasi dengan baik dan saling mendukung.

"Bagaimana memastikan interoperabilitas antar sistem benar-benar berjalan dengan baik, mengingat pengalaman sebelumnya masih ada penyimpangan atau aplikasi pemerintah yang tidak terintegrasi. Padahal digitalisasi dan integrasi data ini harus benar-benar tercapai," ujar Amin.

Ia mengingatkan bahwa digitalisasi bukan sekadar penggunaan aplikasi baru, melainkan juga jaminan adanya efisiensi, transparansi, dan akurasi data dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, tanpa integrasi yang kuat, digitalisasi justru berpotensi menimbulkan masalah baru. (ist,rls/lut)

VIRAL! 3 KM TANGGUL BETON DI TENGAH LAUT CILINCING

Setelah ramai pagar laut di Tangerang beberapa waktu lalu, kini warga net digemparkan dengan adanya tanggul beton yang ada di laut Cilincing. Tanggul beton itu membentang sekitar 2-3 kilometer (km) dan mengganggu jalur melaut dan membuat nelayan harus memutar lebih jauh.



Tanggul laut di Cilincing, Jakarta Utara (Foto: Media sosial)

Dari laman Instagram @cilincinginfo terlihat seorang nelayan mengeluhkan berdirinya tanggul beton, pasalnya karena mengganggu jalur perlintasan dan nelayan harus memutar lebih jauh.

"Tanggul beton nih di Pesisir Cilincing, menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Ini kurang lebih ada 2-3 kilometer panjangnya. Awalnya perlintasan nelayan sehingga kesulitan mencari ikan karena harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini," kata seorang nelayan dalam video tersebut, dikutip Rabu (10/9/2025).

Darji (45) salah seorang nelayan setempat mengatakan tanggul tersebut dibangun sejak tahun 2016. "Mulai pembangunan tahun 2016 atau berapa gitu. Awalnya kan itu buat bikin pelabuhan," ujar Darji, Rabu (10/9/2025) dikutip sindonews.

Beton yang viral di media sosial dan membentang lurus dari daratan mengarah ke laut itu mengganggu aktivitas melaut para nelayan. Sekarang nelayan harus melewati ujung dari beton tersebut untuk sampai ke tempat mencari ikan.

"Cuma sekarang agak terganggu. Kalau ini kan dulu jalan pintas, ini kan harus melewati ujung beton dulu sana jadi beloknya tuh jauh lagi. Jadi membutuhkan minyak bahan bakar

banyak," katanya.

Di mengaku tak pernah mendapat sosialisasi terhadap proyek pembangunan beton apalagi mendapatkan uang kompensasi. "Maunya sih gitu. Ada bantuan," ucapnya.

Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas SDA DKI Jakarta, Ciko Tricanescoro Pemprov DKI Jakarta mengatakan tanggul itu bukan bagian dari proyek NCICD (National Capital Integrated Coastal Development).

Stafus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim menyebut bahwa tanggul beton yang berdiri di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara, bukan kewenangan Pemprov Jakarta. Dia menyebut pembangunan tanggul itu berada di bawah otoritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Itu adalah kewenangan dari KKP. Perizinan terkait itu menjadi kewenangan KKP," kata Chico Hakim, Rabu (10/9/2025).

Chico menjelaskan, lokasi tanggul berada di sekitar kawasan Pelabuhan Marunda. Karena itu, pihak pengelola pelabuhan lebih mengetahui detail perizinan maupun tujuan pembangunan tanggul tersebut.

"Karena ini kewenangan pusat yang dikelola oleh Pelabuhan Marunda. Jadi silakan tanyakan

kepada pengelola Pelabuhan. Pengelolaannya adalah PT itu," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Alfian Widyastanto menjelaskan pihaknya tidak mengeluarkan izin dan tidak memiliki kewenangan terkait pembangunan tanggul tersebut.

Terpisah, Dewan Pembina DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jakarta Utara, Muhammad mengatakan Muhammad menyatakan keberadaan beton tersebut telah mengganggu kegiatan nelayan pesisir. Alhasil, nelayan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengakses keluar dan masuk.

"Akses keluar dan masuk lebih jauh, karena diperuntukan untuk pengurukan dermaga mereka," ungkapnya.

Namun, Muhammad menyampaikan tanggul beton tersebut merupakan milik anak usaha dari PT Karya Teknik Utama dan telah mengantongi izin pusat. PT Karya Teknik Utama adalah perusahaan yang bergerak dalam industri galangan kapal, yang berlokasi di Jalan Marunda Pulo Nomor 1 Kelurahan Cilincing.

"Itu beton milik PT Karya Citra Nusantara, anak perusahaan KTU [Karya Teknik Utama]," kata



Karena ini kewenangan pusat yang dikelola oleh Pelabuhan Marunda. Jadi silakan tanyakan kepada pengelola Pelabuhan. Pengelolaannya adalah PT itu,"

CHICO HAKIM

Stafus Gubernur dan
Wakil Gubernur Jakarta Bidang
Komunikasi Sosial

Muhammad dikutip Bisnis, Rabu (10/9/2025).

Melansir Bisnis, PT Karya Teknik Utama sudah memiliki dokumen P K K P R L dengan Nomor 11092310513100009 tanggal 11 September 2023 untuk kegiatan Industri Galangan Kapal seluas 12,71 hektare. Kemudian, PKKPR dengan Nomor 22112410513100003 tanggal 22 November 2024 untuk kegiatan Industri Galangan Kapal seluas 15,29 hektare.

Perizinan tersebut untuk menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Standart Pembangunan terminal Khusus P B U M K U No. 812011722133800290001 dengan KBLI 30111- Industri Kapal dan Perahu.

Terkait masalah ini, tim Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Jakarta melakukan pengambilan data spasial berupa foto udara menggunakan drone di area dermaga PT Karya Teknik Utama, kegiatan pembangunan dermaga masih berada di area PKKPR.

Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Jakarta juga telah memanggil Pimpinan PT Karya Utama Teknik pada Kamis 23 April 2025 di Kantor Pangkalan PSDKP Jakarta imbas adanya pengaduan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pelabuhan Marunda Center PT Karya Utama Teknik, tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut. (han,ist/lut)